

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A Daim, Nuryanto A, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya
- AG, Subarsono, 2005, *Pelayanan Publik yang Efisien Responsif dan Non Partisipan* dalam buku *Mewujudkan Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Atep, Barata, 2004, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : Elex Media. Komputindo
- CFG, Hartono, Sunaryanti dkk, 2003, *Panduan Investigasi Untuk Ombudsman Indonesia*, Komisi Ombudsman Nasional , Jakarta,
- Fachrudin, Irfan, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni Bandung
- Hadjon, M. Philipus, dkk, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia: Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Cetakan kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Lotulung , Paulus Effendie, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Masthuri, Budi, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita
- MD, Mahfud, Moh dan Marbun, Sf., 2006 , *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta
- Moeliono, Anton M, 1995, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta
- NN, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.
- Nurtjahjo, Hendra dkk, 2013, *Memahami Maladministrasi* , Jakarta, Ombudsman Republik Indonesia

- Poerwadinata W. J. S, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta : Pusat Pembinaan Bahasa, Depdikbud, PN Balai Pustaka
- R.N, Dwijowijoto, dan Patarai, Idris , 2008, *Ombudsman Kota Makasar, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia dan Kota Makasar*, Makasar
- Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sirajudin, Didik Sukriono, Winardi, 2011. *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi*, Setara Press, Malang
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta
- Sujata, Antonius dkk, 2003, *Efektifitas Ombudsman Indonesia, Kajian Tindak Lanjut Kasus-kasus Tertentu (Digest of Selected Cases 2002-2003*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta
- Sujata,, Antonius dkk. 2002, *Ombudsman Indonesia, Masa Lalu, Sekarang dan Masa Mendatang*. Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta
- Sujata, Antonius, 2005, *Peranan Ombudsman Dallah Rngka Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi serta Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih*, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta
- Sutedi, Ardian, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tauda, Gunawan A. 2012, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta
- Tjandra, Riawan, W., 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Widodo, Joko, 2001, *Good Governance*, Insan Cendikia, Surabaya
- Winarsih, dan , Ratminto, 2006, cetakan ketiga, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 139, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 112, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Sekretariat Negara, Jakarta.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, Dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Di Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 42, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 215, Sekretariat Negara, Jakarta.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman DI. Yogyakarta

## **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010

## **JURNAL**

Hasyim, Moh., 2011, *Peranan Lembaga Ombudsman Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lod Diy) Dallam Mewujudkan Akuntabilitas Publik (Beberapa Contoh Kasus)*, Jurnal Ombudsman Daerah, Yogyakarta

## **MAKALAH**

F. Sugeng Istanto, tanpa tahun, “*Usulan Penelitian ( Uraian Tambahan Petunjuk Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis Program Pascasarjana UGM: Khusus untuk Program Studi Hukum)*”.

## **INTERNET**

Mustikasari , Ratna, tanpa tahun, *Eksistensi Ombudsman Daerah*, Lembaga Ombudsman Daerah DIY, <http://lod-diy.or.id/index.php/publikasi/artikel/175-eksistensi-ombudsman-daerah> , diakses pada 17 Maret 2015 pukul 19.00 WIB.